

DARI MAKASSAR KE MAKASSAR: ASPEK DEMOGRAFI DAN POLITIK PROSES “ETNISASI” SEBUAH KOTA

Dias Pradadimara

Abstract

The city of Makassar, once named Ujung Pandang, in South Sulawesi, underwent tremendous transformation in the 20th century. This transformation significantly changed the image of the city from a cosmopolitan town to a provincial and “ethnic” city. This article shows that the changes of the city’s image did not happen by itself. There were changing structural conditions, namely demographic and political conditions, which allowed the changes to happen.

Since early 20th century the population of the city has grown exponentially. First, in-migrants from the surrounding regions in the eastern part of Indonesia flocked into the city until early 1950s. Second, due to the rebellion and unrest in the countryside of South Sulawesi since 1950 in-migrants, mostly refugees, from Bugis-speaking areas in even larger number swarmed Makassar. Parallel with the demographical changes, the political scene in the city (and the province) was increasingly dominated by politicians and bureaucrats of South-Sulawesi origins. The Permesta rebellion in late-1950s triggered the departure of mostly non-South Sulawesi politicians away from the region leaving the political stage fully in the hands of local politicians. The “ethnic-ization” of the city was made possible by these demographical and political changes.

Pendahuluan

Dari para pemasang iklan dalam satu buku petunjuk turis untuk Kota Makassar, mungkin dapat dibayangkan kondisi kota tersebut di tahun 1938. Inilah sebuah kota kosmopolitan dengan segala fasilitasnya yang telah menjadikan kota ini sebagai bagian dari sebuah jaringan komunikasi dan transportasi yang menghubungkannya dengan segala penjuru dunia. Di Pasarstraat (sekarang Jl. Nusantara) yang selalu sibuk, setidaknya ada tiga toko pakaian besar masing-masing “Hotchand Kemchand,” “Bombay Moerah,” dan “Liberty.” Nama-namanya mengindikasikan setidaknya dua dari tiga toko tersebut dimiliki oleh pedagang keturunan India. Sementara

itu, tidak jauh dari sana, di Tempelstraat (sekarang Jl. Sulawesi), dalam sebuah gedung indah ada toko pakaian dengan nama dalam bahasa Prancis "Au Bon Marche." Kalau itu belum cukup, masih ada satu tempat lagi yang juga menyiarkan aksen Prancis yang meskipun namanya *Maison "Femina"*, membuka pintunya untuk *dames* maupun *heeren*. Bila kebutuhan pakaian dapat dipenuhi dengan toko-toko tersebut, untuk kebutuhan hasil-hasil peternakan dapat menghubungi *boerderij "Frisia"* di Goaweg (sekarang Stadion Matoangin). Di sana disediakan susu segar dari sapi Australia maupun sapi dari —seperti juga nama perusahaannya— Frisland di ujung utara Negeri Belanda. Di tempat ini, pemiliknya yang tampaknya keturunan Eropa Timur, U. Hudoffsky, juga menyediakan yoghurt Bulgaria "asli" dan juga mentega (*Gids van Makassar en Zuid Celebes*, 1939).

Bila barang-barang yang dijinjing dari toko-toko sudah terlalu banyak, tersedia beberapa perusahaan taksi yang siap mengantar. Namun tidak sedikit penduduk kota yang lebih memilih untuk membeli sedan Italia, "Fiat," baik model yang paling irit maupun yang paling gaya, yaitu model 1500 sang "Kereta Ajaib." Jika tidak, meskipun lebih boros, tersedia pula sedan Amerika "Dodge," termasuk yang paling besar dan mewah, yaitu Dodge-Six "De Luxe" dengan 7 tempat duduk. Semua dapat dipesan langsung melalui telepon dengan pedagang mobil, H.P. Lienhardt, juga berada di Pasarstraat. Kesan kosmopolitan Kota Makassar diperkuat dengan hadirnya 9 konsulat yang mewakili negara-negara Denmark, Swedia, Norwegia, Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Portugal, dan satu negara Asia, Cina.

Perluasan dan pembangunan Kota Makassar hingga memiliki bentuk seperti yang didapat di tahun 1938 di atas baru dimulai sekitar 30 tahun sebelumnya. Jika pada akhir abad ke-19 jumlah penduduk kota ini berada pada kisaran 20 ribuan saja, maka setelah penaklukan penguasa-penguasa lokal di Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Hindia Belanda di tahun 1905-6, jumlah penduduknya terus berlipat. Di tahun 1905, jumlah penduduk kota ini diperkirakan 26 ribu orang. Dua puluh lima tahun kemudian, menurut hasil sensus tahun 1930, penduduknya sudah berlipat lebih dari 3 kali dan mencapai lebih dari 84 ribu orang. Hal ini membuat Makassar menjadi kota besar kedua di luar Jawa setelah Palembang. Ada tanda-tanda penduduk kota ini terus bertambah, namun sayang sulit diketahui secara tepat laju pertumbuhannya karena tidak ada lagi penghitungan

penduduk yang cukup tepat yang dilakukan hingga setelah tahun 1960. Kota Makassar di tahun 1930-an sudah dilayani dengan fasilitas kota yang baik. Dalam buku petunjuk untuk turis di tahun 1938, Makassar sudah dibanggakan sebagai "kota yang paling diterangi di Hindia Belanda." Di masa itu, listrik, seperti juga gas, dilayani oleh perusahaan swasta dan terdapat 4.342 pelanggan listrik di Makassar yang menggunakan 4,7 juta kilowatt jam tenaga listrik. Jika diasumsikan bahwa tiap pelanggan menggunakan listrik untuk rumahnya yang dihuni oleh, katakanlah, 5 orang anggota keluarga, maka 21 ribu lebih penduduk kota (atau hampir seperempat dari keseluruhan penduduk) sudah menikmati aliran listrik. Kemudian, sejak 1924 pemerintah kota sudah menyediakan fasilitas air minum yang memadai. Di Goaweg, dibangun satu menara air yang masih berfungsi hingga sekarang. Sumber air bakunya diambil dari sungai Jeneberang dengan menggunakan pompa, sedang pipa transmisi airnya dibuat sepanjang 7 km dari Sungguminasa. Kota Makassar di abad ke-20 adalah kota "baru" yang tumbuh bersamaan dengan semakin meningkatnya perekonomian di kota, di sekitar kota, di daerah-daerah di sebelah timur Sulawesi, dan di Hindia Belanda secara keseluruhan dan bersamaan dengan melandanya kemodernan yang melanda daerah-daerah koloni (Harvey, 1989 dan Yulianto Sumalyo, 2002).

Kota Makassar tumbuh dari kota kolonial yang terbentuk di sekitar benteng Rotterdam mulai akhir abad ke-17. Permukiman-permukiman baru, seperti Vlaardingien dan Kampung Baru, tumbuh di sebelah utara dan selatan benteng dan dihuni oleh masyarakat dari berbagai kelompok, termasuk Melayu, Cina, Belanda, Bugis, Jawa, dan tentu saja, kelompok masyarakat Makassar dari Gowa dan sekitarnya. Di tahun 1930, di kota ini terdapat hampir 3500 penduduk Eropa, lebih dari 15.000 Cina, dan lebih dari 65 ribu bumiputera dari berbagai daerah di Hindia. Untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman di kota, di tahun 1918 dikeluarkan *Bouw en Woonverordening voor de Gemeente Makassar* yang kemudian diperbaiki di tahun 1949 dan 1952 dan sekarang sudah dilupakan sama sekali. Peraturan ini digunakan untuk mengatur bangunan yang akan didirikan dan secara tidak langsung melakukan zonasi untuk tempat tinggal dari kelompok yang berbeda. Tahun 1926 juga dikeluarkan *Hinderordonantie* yang digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat atau tidak dapat dilakukan di kota (McTaggart 1976). Tumbuhnya permukiman di sekitar Benteng Rotterdam ini seakan

menandakan adanya keterputusan historis antara daerah yang kelak menjadi Kota Makassar dengan bekas Benteng Somba Opu yang terletak di sebelah selatannya yang pernah menjadi pusat perdagangan di bawah kontrol penguasa Gowa. Permukiman di sekitar Benteng Rotterdam adalah kota baru yang tumbuh dari pelbagai elemen campuran yang menjadi akar kota di kemudian hari. Penduduk bumiputera terus mengalir dan mengisi kota ini dari berbagai daerah di seluruh Hindia, terutama dari bagian timur. Dengan kata lain, Kota Makassar adalah kota kolonial yang lahir bersamaan dengan hadirnya sumber kekuasaan baru yang tidak hanya berbeda, namun berhadap-hadapan dan bersaing dengan "kota lama" di sebelah selatannya yang menjadi simbol kekuasaan Gowa yang sudah memudar.

Pertumbuhan dan perluasan Kota Makassar berlangsung sejajar dengan semakin lengkapnya perangkat birokrasi pemerintah. Tiga tahun setelah *Decentralisatiewet* 1903 diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Idenburg dan segera setelah penaklukan penguasa-penguasa lokal selesai dilaksanakan, Makassar menjadi sebuah *gemeente* yang berhak mengatur dan memerintah diri sendiri. Untuk itu, dibentuk pula Dewan Kota (*Gemeenteraad*) yang beranggotakan 13 orang yang terdiri dari delapan orang Belanda, tiga orang pribumi, dan dua orang timur asing, serta diketuai oleh Kepala Pemerintahan Daerah Afdeling Makassar (*Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur van de Afdeling Makassar*). Lima tahun kemudian susunan Dewan Kota diperbesar dengan ditambahkannya dua orang Belanda. Pada 1916, dewan ini mengusulkan adanya perubahan lebih lanjut terhadap struktur pemerintahan kota ini. Usul ini diterima oleh Gubernur Jenderal dan di tahun 1918, Makassar memperoleh walikotanya (*Burgemeester*) yang pertama. Walikota jugalah yang menjadi ketua Dewan Kota. Dua puluh tahun kemudian, di tahun 1938, status Makassar berubah lagi menjadi Kotapraja (*Stadsgemeente*) dengan hak-hak pengaturan yang diperluas dan jumlah anggota dewan diperbanyak. Kali ini, dua orang pribumi ditambahkan ke dewan dan menjadikan jumlah total anggotanya 17 orang (*Pedoman Kota Besar Makassar*, 1954).

Menuju Ke Dua Wajah Makassar

Bagaimana kontradiksi antara desentralisasi dan penaklukan dijelaskan? Apakah logika yang berlaku yang mengatur, di satu sisi, pelaksanaan

sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan pada daerah seperti yang dimaksud dengan undang-undang desentralisasi 1903 dan di sisi lain, penaklukan secara sistematis semua penguasa-penguasa lokal di Sulawesi Selatan di tahun 1905-6? Tampaknya kontradiksi yang tidak terpecahkan inilah yang akan terus mewarnai pemerintahan Hindia Belanda setidaknya di Sulawesi Selatan, bahkan hingga berakhirnya Negara Indonesia Timur di tahun 1949. Inilah kontradiksi antara keinginan untuk terbentuknya sebuah sistem administrasi yang modern dan impersonal yang berbenturan dengan realitas lapangan yang masih kental diwarnai sistem kekuasaan yang bersifat tradisional dan sangat personal. Di Kota Makassar, kontradiksi ini muncul ke permukaan dengan lahirnya sebuah sistem pemerintahan kota bermuka dua. Di satu sisi, sistem pemerintahan ini didasarkan pada sistem "modern" yang dilengkapi dengan adanya Dewan Kota yang menjadi perwakilan warga kota (maksudnya terutama warga kota berstatus hukum Eropa yang minoritas). Di sisi lain —atau bahkan sisi bawah, hampir di bawah permukaan yang tidak akan tampak dalam buku panduan untuk turis— ada sistem pemerintahan yang mengandalkan pada penguasa-penguasa lokal dan juga mata-mata untuk mengawasi mayoritas penduduk yang bumiputera (Edward Lambertus Poelinggomang, 1983).

Kalau di satu sisi pemerintahan "modern" yang diciptakan mengambil bentuk satu pemerintahan kota yang bekerja dengan sistem perwakilan yang (seharusnya) liberal dan demokratis, maka di sisi lain pemerintahan Kota Makassar didasarkan pada sistem pembagian wilayah di setiap wilayah terdapat seorang kepala yang dipilih berdasarkan pada sistem patron-klien tradisional. Sisi pemerintahan modern adalah wilayah bagi warga kota Eropa, sedang sisi pemerintahan tradisional digunakan untuk mengontrol warga kota lainnya yang bukan Eropa. Bersamaan dengan diperolehnya status *gemeente*, Kota Makassar dibagi pula menjadi enam distrik, masing-masing Makassar, Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah, dan Mariso. Sejak tahun 1921, hanya empat distrik yang tersisa di kota ini dengan dihapuskannya distrik Melayu dan Ende. Setiap distrik dikepalai oleh seorang *kapitein* atau *kapitang*, kecuali Ujung Tanah dan Mariso yang dikepalai oleh seorang *gallarang* yang semuanya digaji. Untuk warga kota Cina masih ditunjuk satu *major*, sedang untuk kelompok Timur Asing lainnya juga ditunjuk satu *kapitein*. Di setiap distrik, terdapat kampung-kampung yang juga diketuai oleh seorang kepala kampung

(*matoa kampung* atau *kampung hoofd*) yang dipilih sendiri oleh para laki-laki dewasa di sana dari antara mereka sendiri.

Kepala kampung kemudian menjadi semacam jembatan yang menghubungkan antara kedua muka sistem pemerintahan kota. Memang benar bahwa kampung, seperti juga desa, adalah sebuah 'ciptaan' kolonial (Bremen, 1981 dan Edward Lambertus Poelinggomang, 1983). Ia adalah perkembangan dari sebuah permukiman yang bersifat "etnis" (artinya, dapat jadi penduduk satu kampung adalah migran dari daerah yang sama), namun kemudian mengambil bentuk teritorial (memiliki wilayah) yang kemudian diintegrasikan dalam sebuah struktur pembagian wilayah koloni. Kenyataan bahwa kepala kampung dipilih oleh dan dari kalangan para lelaki dewasa di permukiman tersebut memberikan ruang kemungkinan bagi terus dimainkannya elemen-elemen kekerabatan (baik kekerabatan sesungguhnya maupun buatan) dan karisma pribadi —keduanya adalah basis bagi sistem patron-klien tradisional— dalam pemilihan kepala kampung. Dengan kata lain, di bawah permukaan sistem pemerintahan Kota Makassar yang modern, dibentuk dan dipertahankan sistem kekuasaan lama dengan berbagai elemen tambahan baru yang campur aduk.

Kedua muka sistem pemerintahan Kota Makassar ini tidak diubah setelah pendudukan Jepang berakhir, meskipun dengan pemain yang berbeda. Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) membentuk kembali pemerintahan kota. Di antara tahun 1945 hingga 1950, kecuali untuk beberapa bulan di tahun 1947, kota ini dipimpin oleh tiga orang Makassar sendiri, masing-masing Baso Daeng Malewa sebagai *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* yang kemudian diganti oleh Abdurrajab Daeng Massiki. Selanjutnya, dari 1947 hingga 1950 Kota Makassar kembali memiliki walikota dan dipegang oleh Abdul Hamid Daeng Magassing. Melalui pemilihan, dibentuk pula Dewan Kota pada bulan Agustus 1947. Dewan ini beranggotakan 21 orang yang terdiri dari empat orang dari golongan Belanda, empat orang dari golongan Cina, dan sisanya dari golongan Indonesia—suatu komposisi yang hampir terbalik dengan komposisi di masa sebelum pendudukan Jepang. Meskipun demikian, dualisme sistem pemerintahan kota yang lama sulit dihapus karena tiga hal. *Pertama*, karena berbagai alasan, perubahan belum menyentuh sistem pemerintahan di kampung-kampung. *Kedua*, sejak tahun 1948, sejalan dengan politik NIT, daerah-daerah di Sulawesi Selatan, kecuali Kota Makassar, mendapat

satu sistem pemerintahan yang sedikit banyak meniru sistem pemerintahan tradisional dengan pengakuan atas kedudukan penguasa lama (sebagai "raja" atau istilah semacamnya) serta pembentukan Dewan Hadat di tiap daerah. "Perpanjangan hidup" sistem legitimasi tradisional di masa pascakemerdekaan ini secara tidak langsung seolah membenarkan sistem patron-klien tradisional yang begitu mewarnai kekuasaan di kampung-kampung di Kota Makassar dari masa sebelum 1942. *Ketiga*, dengan dibentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) di tahun 1946 mulai berdatanganlah para politisi dari seluruh daerah ke Makassar yang menjadi ibukota NIT.

Seperti yang disimpulkan oleh Harvey, ditetapkannya Makassar menjadi ibukota NIT mengakibatkan dua hal lain. *Pertama* adalah dipertahankannya kekosmopolitan dan kemultietnisan kota dengan datangnya para politisi dari seluruh penjuru Indonesia bagian timur maupun politisi dan wartawan dari Negeri Belanda dan negara-negara lain. Sifat kosmopolitan dan multietnis yang tidak jauh berbeda dengan masa sebelum pendudukan Jepang ini seolah mempertajam perbedaan antara Kota Makassar dengan daerah pedesaan di Sulawesi Selatan yang umumnya jauh dari sifat kosmopolitan dan dihuni hanya oleh satu atau paling banyak dua kelompok etnis. *Kedua*, dalam persepsi para anggota laskar yang bergerak di pedesaan, Makassar menjadi simbol gerakan kolaborasi dengan Belanda. Kedua kondisi di atas membuat pengalaman "berjuang" di masa "revolusi" menjadi sangat berbeda bagi mereka yang bergerak di dalam atau di luar kota.

Dengan kata lain, berbagai dinamika yang terjadi di tahun 1940-an mengakibatkan dualisme di dalam kota bergeser menjadi dualisme antara Kota Makassar *vis-à-vis* daerah pedesaan. Makassar kemudian dianggap sebagai kotanya "boneka", sedang pedesaan adalah daerahnya "patriot" (Harvey, 1985). Yang menjadi "korban" dalam dikotomi sederhana semacam itu adalah mereka yang selama ini aktif dalam NIT dan dikenal sebagai republikan. Tempat, arena, dan cara berpolitik mereka membuat mereka tidak dapat jauh dari citra "boneka." Pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana kekosmopolitan maupun kemultietnisan kemudian mendapat citra yang buruk pula? Apakah kemudian kekosmopolitan dan kemultietnisan harus berhadapan dengan kesukuan dan ke-"asli"-an? Sejauh mana kebanggaan akan, misalnya, ke-Bugis-an ataupun ke-Mandar-

an seseorang berpengaruh terhadap cita-citanya tentang Kota Makassar di masa depan?

Aspek Demografi

Sistem pemerintah kota yang bermuka dua tersebut berakhir bersamaan dengan berakhirnya riwayat NIT dan menciptakan satu periode transisi di sepanjang dekade 1950-an. Berakhirnya riwayat NIT tidak berarti berakhir pula masa sulit. Masuknya Kahar Muzakkar ke hutan di tahun 1950 menandakan dimulainya 'masa gerombolan' dan mengalirnya pengungsi ke Kota Makassar. Jika di tahun 1930 penduduk kota adalah sedikit di atas 84 ribu orang, maka di tahun 1961 penduduk kota sudah menjadi lebih dari 384 ribu (*Sensus Penduduk*, 1961). Ini berarti bahwa selama 30 tahun Makassar mendapat tambahan 300 ribu jiwa atau tumbuh dengan laju hampir 5 persen per tahun. Dengan kata lain, dalam rentang waktu tersebut, penduduk Kota Makassar berlipat hampir 5 kali. Dari data lain yang tersedia, dapat diperoleh satu kesimpulan awal (yang masih harus diuji) bahwa terdapat dua gelombang migrasi masuk ke Kota Makassar dari tahun 1945 hingga tahun 1970. Gelombang migran pertama masuk ke kota di antara tahun 1945 hingga 1950 dari pelbagai daerah di Indonesia timur, sedangkan gelombang migran kedua masuk ke kota dari tahun 1950 hingga akhir tahun 1960-an dan mereka umumnya berasal dari daerah di Sulawesi Selatan sendiri. Arus masuk migran gelombang pertama lebih merupakan refleksi pentingnya posisi sosial politik Kota Makassar di daerah Indonesia bagian timur. Para migran gelombang kedua masuk ke kota untuk menghindari ketidakamanan dan ketidakpastian di daerah pedesaan Sulawesi Selatan bersamaan dengan meluasnya operasi militer, baik oleh TNI maupun oleh 'gerombolan.' Migran gelombang kedua ini berjumlah lebih banyak dari migran gelombang pertama.

Hingga tahun 1950-an masyarakat Kota Makassar, terutama yang berada di tengah kota, masih merupakan masyarakat yang heterogen, berasal dari berbagai kelompok etnis. Dari hasil survei yang dilakukan H. T. Chabot di satu permukiman di tengah kota di tahun 1951-2, diketahui bahwa hanya 35 persen warga setempat lahir di Kota Makassar, 31 persen penduduk lahir di daerah Indonesia bagian timur (Minahasa, Ambon, dan seterusnya), sedangkan 18 persen lahir di luar Kota Makassar, tetapi masih di daerah Sulawesi Selatan. Hanya 6 persen dari keseluruhan warga

permukiman itu lahir di Jawa dan 0,5 persen kelahiran Cina. Dari survei yang sama, juga diketahui bahwa 34,5 persen dari seluruh penduduk (atau 52 persen dari mereka yang tidak dilahirkan di Makassar) baru datang ke Makassar paling lama 5 tahun sebelumnya¹. Hasil survei ini mengindikasikan setidaknya dua hal. *Pertama* adalah adanya arus migrasi yang mengalir cukup deras, terutama dari daerah lain di Indonesia bagian timur dan dalam skala yang lebih kecil, dari daerah lain di Sulawesi Selatan hingga tahun 1950 ke Kota Makassar. Dari data Chabot diketahui bahwa arus migrasi mengalir sejak awal abad ke-20, tetapi bertambah deras sejak tahun 1930 dan melonjak sejak tahun 1945. *Kedua* adalah apabila diasumsikan bahwa etnisitas mereka yang tidak dilahirkan di Makassar adalah sama dengan etnisitas mayoritas masyarakat di tempat kelahirannya tersebut (artinya, yang lahir di Manado diasumsikan sebagai etnis Minahasa, misalnya), terdapat adanya keberagaman etnis yang luar biasa di Makassar di tahun 1950, yaitu lebih dari sepertiga penduduk kota berasal dari daerah di Indonesia bagian timur. Belum lagi jika diperhitungkan adanya keberagaman masyarakat Makassar sebelum pendudukan Jepang. Meskipun tidak ada data yang setepat dan sedetil yang dimiliki oleh Chabot, dapat diperkirakan bahwa migran yang datang dari tahun 1950 hingga 1960-an memiliki karakter yang berbeda dengan migran sebelumnya. Perlu diingat bahwa tahun 1950-an adalah masa memuncaknya konflik militer di pedesaan Sulawesi Selatan.

Banyak daerah di luar kota yang mengalami pertumbuhan penduduk sangat rendah atau bahkan minus. Dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti Universitas Hasanuddin di tahun 1972, diketahui bahwa penduduk Makassar (termasuk anak dari migran gelombang pertama) yang lahir di kota ini tidak mencapai separuh dari total penduduk (tepatnya hanya 42,6 persen). Di masa itu lebih banyak penduduk kota yang lahir di daerah lain di Sulawesi Selatan, terutama di daerah yang berbahasa Bugis,

¹ H.T. Chabot, "Enkele Resultaten van Een Onderzoek onder Verschillende Bevolkingsgroepen in de Stad Makassar (Zuid Celebes, Indonesie) gehouden in de Jaren 1951-1952" KITLV HS coll. HD 1521. Data ini juga mengoreksi temuan dalam buku *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan* (yang menggunakan data hasil wawancara. Lihat Bab II) yang beranggapan bahwa sebagian besar penduduk permukiman-permukiman di Makassar adalah orang Makassar. Anggapan ini dapat jadi muncul karena tidak adanya sikap kritis dan hati-hati atas hasil wawancara yang sering dibentuk oleh adanya *false memory* (ingatan salah).

daripada yang lahir di dalam kota. Hampir 30 persen penduduk kota lahir di daerah berbahasa Bugis, sedang 12,4 persen lahir di daerah berbahasa Makassar di luar kota. Mereka yang lahir di daerah yang berbahasa Toraja dan Mandar tidak mencapai 6 persen dari penduduk total kota. Demikian pula mereka yang lahir di Indonesia, tetapi di luar Sulawesi Selatan tidak mencapai 9 persen (M. Idrus Abustam, 1989).

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar migran dari gelombang migrasi kedua berasal dari daerah yang berbahasa Bugis. Gelombang migrasi Bugis di tahun 1950-an ini sedemikian besarnya sehingga meningkatkan proporsi kelompok etnis Bugis terhadap keseluruhan penduduk Makassar. Apabila sampai tahun 1951, atau setelah gelombang migrasi pertama, tidak sampai 18 persen penduduk kota dilahirkan di daerah berbahasa Bugis, maka di tahun 1972, setelah gelombang migrasi kedua, hampir 30 persen penduduk kota lahir di daerah berbahasa Bugis. Bukan tidak mungkin bahwa di awal tahun 1970-an mereka yang menganggap diri sebagai orang Bugis, termasuk mereka yang lahir di kota Makassar, adalah generasi kedua atau ketiga migran dari daerah berbahasa Bugis, merupakan mayoritas penduduk kota. Atau dengan kata lain, Kota Makassar tidak dapat lagi disebut kotanya orang (berbahasa) Makassar. Dari sudut ini saja dapat dianggap sangat tepat apabila nama Kota Makassar diganti dengan nama Ujung Pandang di tahun 1971. Mungkin tidak disadari pada saat itu bahwa nama baru ini dapat melepaskan konotasi etnis kota ini, sejalan dengan menurunnya proporsi penduduk berbahasa Makassar ataupun yang lahir di Makassar. Setelah itu, seorang yang berasal dari Majenne atau yang berdarah Madura atau Cina tanpa keraguan dapat menyebut dirinya "orang Ujung Pandang," satu hal yang tidak dapat dilakukan sebelumnya dengan sebutan "orang Makassar." Nama "Ujung Pandang" adalah simbol ke-"baru"-an masyarakat Kota Makassar yang sudah mulai terbentuk di awal abad ke-20.

Setelah Sensus Penduduk 1930, untuk pertama kali informasi tentang "suku bangsa" kelompok etnis ditanyakan lagi dalam Sensus Penduduk 2000. Secara nasional ditemukan 101 kelompok etnis yang mencakup 93,05 persen dari 201,092 juta penduduk Indonesia. Sisanya yang sekitar 6,95 persen atau 13,972 juta terdiri dari berbagai kelompok yang jumlahnya relatif sedikit. Etnis Makassar sekitar 0,94 persen dan jumlah ini lebih rendah bila dibandingkan dengan etnis Bugis, yaitu 2,49 persen, dari etnis yang ada di Indonesia. Dilihat menurut provinsi yang ada di Pulau

Sulawesi, etnis Makassar bukan merupakan jumlah yang cukup besar, kecuali di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, etnis yang cukup dominan adalah Bugis 41,90 persen, disusul dengan Makassar 25,43 persen dari 7,794 juta jiwa. Untuk Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo, etnis Makassar tidak termasuk dari 15 etnis yang cukup besar jumlahnya. Akan tetapi, etnis Bugis di Provinsi Sulawesi Tengah menempati urutan ketiga, di Sulawesi Utara urutan kesepuluh, di Sulawesi Tenggara urutan kedua, dan Gorontalo menempati urutan kesembilan. Hasil Sensus Penduduk 2000 ini, sebetulnya dapat dirinci menurut kota dan kabupaten. Hasil Sensus Penduduk 2000 untuk Kota Makassar menunjukkan bahwa hanya 42,8 persen etnis Makassar yang tinggal di kota ini. Sisanya dihuni oleh etnis Bugis (32,3 persen), Toraja (5,9 persen), Jawa (4,9 persen), Mandar (1,5 persen), Luwu (0,4 persen), Duri (0,6 persen), Selayar (0,7 persen), serta etnis lainnya (10,8 persen).

Fasilitas kota yang dibangun untuk kapasitas tahun 1930-an jelas tidak lagi mampu menopang jumlah migran yang terus masuk dan menyebabkan peningkatan penduduk yang tajam. Kondisi ekonomi yang memburuk hingga akhir 1960-an dan kondisi politik nasional yang juga tidak menentu membuat keadaan semakin runyam. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung di tahun 1973 dapat diketahui bahwa daerah permukiman yang bangunannya "bermutu baik" hanya berada di tengah kota, sedang kondisi sebaliknya dapat ditemui di pinggiran kota, seperti di sekitar Panampu, Baraya, Kalukubodoa, Maccini, dan Barabaraya. Di daerah-daerah pinggiran inilah para migran umumnya tinggal, "membangun daerah-daerah permukiman miskin dan perumahan setengah liar yang luas di sekeliling bagian pinggiran kota yang ada, dan mengambil alih tanah apa saja yang mereka anggap tidak berpenghuni" (McTaggart *ibid.*, hal. 76, 96).

Aspek Politik

Sejak berakhirnya NIT, kendali atas Kota Makassar, setidaknya di atas kertas, berada pada para walikota yang merupakan, meminjam istilah yang digunakan oleh Harvey, "anak daerah." Kalau bubarnya NIT adalah momentum berakhirnya peranan politisi keturunan Belanda di Makassar, maka meletusnya Permesta menjadi katalis merosotnya peranan politisi

non-Sulawesi Selatan di kota ini. Deklarasi Perjuangan Semesta Alam (lebih populer diingat dengan singkatannya, Permesta, mungkin karena makna nama lengkapnya agak kabur) dideklarasikan di Makassar tanggal 2 Maret 1957 di kediaman Gubernur Sulawesi yang pada masa itu dijabat oleh Andi Pangeran Petta Rani. Lima puluh satu orang sipil dan militer hadir di sana. Di antara mereka yang hadir adalah M.Yusuf Amir, Saleh Lahade, Andi Mattalatta, H.N. Vince Sumual, S.H Ngantung, dan Bing Latumahina. Ny. Towoliu, ketua DPRDS Kota Makassar dari Partai Kedaulatan Rakjat (PKR), adalah satu-satunya wanita yang hadir. Sikap keras Markas Besar Angkatan Darat terhadap gerakan tersebut dan perbedaan persepsi di antara tokoh-tokoh Permesta sendiri menyebabkan perpecahan di dalam gerakan. Tanggal 5 Juni 1957, perpecahan tersebut membesar dan menjadi terbuka. Pada pertengahan Juni, Sumual memindahkan markas besar Permesta ke Kinilow di Minahasa dan membawa serta tokoh-tokoh Permesta, terutama yang berasal dari Minahasa. Perpecahan di dalam gerakan tersebut kemudian menjadi perpecahan "geografis", tokoh-tokoh politik Sulawesi Selatan memegang peranan penting berada di Makassar, sedangkan tokoh-tokoh lainnya (yang sebagian besar bukan orang Sulawesi Selatan) berada di Minahasa (Harvey 1989). Dapat dikatakan bahwa sejak akhir 1950-an Makassar berada sepenuhnya di tangan orang-orang Sulawesi Selatan yang sebagian besar adalah anggota militer.

Dari tahun 1952 hingga 1956, kedudukan walikota Makassar dipegang oleh Achmad Dara Sjahrudin dari partai Masjumi. Naiknya A.D. Sjahrudin ini tidak mengejutkan mengingat hasil pemilu lokal yang diselenggarakan pada tahun 1952 untuk mengisi keanggotaan DPRDS tingkat II Kota Makassar, Masjumi menduduki 7 dari 35 kursi atau 20 persen dari total. Setelah dipegang oleh M. Junus Daeng Mile dan Abd. Latief Dg. Massikki, kedudukan walikota dipegang oleh Aroepala sejak tahun 1960 hingga bulan Mei 1965. Sejak tahun 1965 hingga tahun 1994, kedudukan walikota selalu dipegang oleh perwira angkatan darat yang dimulai oleh Mayor M. Dg. Patompo, Letkol. Abustam, Kol. Janci Raib, dan Kol. Soewahjo. Hanya sekali orang yang bukan berasal dari Sulawesi Selatan menjabat posisi walikota Makassar, yaitu Soewahjo. Soewahjo juga merupakan perwira militer terakhir yang memegang jabatan tersebut karena ia sejak 1994, setelah ia menjabat, kembali dua orang Sulawesi Selatan yang juga adalah birokrat karier yaitu Malik B. Masry dan Amiruddin Maula, menjadi

walikota². Dominasi politik orang Sulawesi Selatan, baik atas Kota Makassar maupun atas Provinsi Sulawesi Selatan, tampaknya sejajar dengan terus masuknya migran lokal (dari Provinsi Sulawesi Selatan sendiri) ke Kota Makassar. Kondisi keamanan yang terus membaik di pedesaan ternyata tidak membuat penduduk daerah tersebut lebih betah untuk tinggal di tempat kelahirannya. Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar di masa Orde Baru berada jauh di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Kalau Provinsi Sulawesi Selatan selalu mengalami laju pertumbuhan yang rendah, sebaliknya Kota Makassar mengalami laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada periode yang sama. Laju pertumbuhan sebesar 5,52 persen dari tahun 1971 ke tahun 1980 (dengan memasukkan penduduk di kecamatan yang diserap oleh Kota Makassar) memang cukup dramatis, apalagi pertumbuhan penduduk provinsi hanya 1,74 persen. Di dekade berikutnya, laju pertumbuhan penduduk kota mencapai 2,9 persen atau lebih dari dua kali laju pertumbuhan penduduk provinsi. Meskipun laju pertumbuhan penduduk kota menurun di dekade 1990-an, angkanya masih lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, dengan semakin membaiknya jalan raya antarkota dan melimpahnya angkutan penumpang (*pete-pete*) antara Kota Makassar dengan daerah-daerah di sekitarnya, semakin tinggi pula arus migrasi sirkuler dan ulang-alik.

Dapat disimpulkan bahwa gerakan penduduk keluar dari daerah pedesaan di Sulawesi Selatan dari 1945 hingga 1970 telah menciptakan momentum yang tidak berhenti meskipun kondisi yang mendorong gerakan tersebut sudah berubah. Dari penelitian M. Idrus Abustam (1989) di pertengahan tahun 1980-an, dapat dilihat bahwa dalam periode tersebut lebih banyak faktor penarik (*pull factors*) dari luar pedesaan yang menyebabkan berpindahnya penduduk keluar tempat kelahirannya. Satu hal yang jelas dari penelitiannya adalah bahwa bermigrasi membutuhkan modal. Oleh karenanya, mereka yang tergolong sangat miskin cenderung tidak akan bermigrasi. Sebaliknya, semakin baik ekonomi keluarga maupun ekonomi desa, semakin tinggi kecenderungan untuk bermigrasi. Memang

² Sebagai catatan, sejak Soediro diganti sebagai Gubernur Sulawesi di tahun 1954, tidak pernah lagi daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh gubernur yang tidak berasal dari daerah ini. Dan setelah Lanto Daeng Pasewang menjabat gubernur dari tahun 1954 hingga 1956, baru sekali jabatan tersebut dipegang oleh sipil, yaitu oleh Achmad Amiruddin (1983-93).

dari hasil penelitian di tahun 1995 (Thoman Pardosi *et.al.*, 1997) diketahui bahwa 42,8 persen migran yang masuk ke Kota Ujung Pandang karena alasan pendidikan, sedangkan 21,8 persen masuk karena alasan mengikuti suami/isteri/orang tua/anak. Hanya 11,5 persen masuk ke Ujung Pandang karena alasan untuk mencari pekerjaan. Hasil survei ini semakin menunjukkan bahwa sebenarnya Kota Ujung Pandang lebih menawarkan jasa pelayanan pendidikan daripada menawarkan kemungkinan pekerjaan.

Kota Sektor Informal

Ekonomi kota ini adalah ekonomi yang didasarkan pada sektor jasa yang sangat besar. Namun, apabila dalam teori ekonomi dikatakan bahwa sektor tersier (jasa) merupakan perkembangan dari ekonomi sekunder (manufaktur), maka tidak demikian dengan ekonomi kota ini. Ekonomi Kota Makassar tidak pernah merupakan ekonomi manufaktur, bahkan sejak sebelum pendudukan Jepang. Peranan Kota Makassar sebagai kota perdagangan dan pelabuhan transit jauh lebih penting daripada perannya sebagai daerah industri. Apabila dalam registrasi pemerintah atau catatan statistik ditemukan kategori "industri" maka, seperti kata seorang pengamat di tahun 1970-an, "aktivitas yang terdaftar sebagai 'industri' pada kenyataannya merupakan beberapa bentuk dari pelayanan kwasi-eceran, seperti reparasi mesin" (McTaggart 1976). Kaburnya garis pemisah antara industri dan jasa dapat jadi sebenarnya disebabkan oleh skala perusahaan yang cenderung kecil. Skala kecil berarti adanya fleksibilitas usaha di tengah ketidakpastian pasar. Perhitungan dari data dua puluh tahun kemudian menunjukkan kondisi yang belum banyak berubah. Rata-rata jumlah pekerja di tiap usaha yang digolongkan sebagai manufaktur di Kota Makassar di tahun 1996 hanyalah 6,1 orang dan lebih dari 75 persen perusahaan yang tergolong dalam sektor ini memiliki 5 orang pekerja atau kurang (Titus, 1999).

Oleh karenanya, urbanisasi ke Kota Makassar/ Ujung Pandang sejak tahun 1945 dapat menjadi satu contoh klasik proses "urbanisasi tanpa industrialisasi" atau proses meningkatnya pergerakan penduduk ke kota yang tidak disebabkan ataupun dibarengi dengan proses industrialisasi kota tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah ke dalam sektor apa para migran tersebut dapat diserap? Jawabannya adalah sektor informal yang merupakan sektor "ajaib" yang dapat menyerap banyak pekerja dengan

margin keuntungan yang terus mengecil dan tingkat kompetisi yang terus meningkat. Sejak pertengahan tahun 1970-an, seorang pengamat Kota Ujung Pandang terkesima melihat besarnya sektor informal di kota dan terbagi-baginya sektor tersebut menjadi pedagang-pedagang kecil yang tersebar di setiap sudut kota. Di akhir tulisannya, ia memberikan dugaan yang pesimistis bahwa bila masih terjadi kelebihan (*oversupply*) tenaga kerja dan sektor informal ini masih menjadi “tempelan” sistem ekonomi regional secara keseluruhan serta menjadi tempat para buruh murah menyelamatkan diri dari kemungkinan pengangguran, maka kemiskinan akan menjadi karakteristik pekerja sektor informal ini (Forbes, 1979). Hampir 30 tahun kemudian, sektor informal terbukti masih menjadi penopang utama ekonomi Kota Makassar.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa sektor informal merupakan lahan subur untuk terus dipertahankannya relasi patron-klien tradisional. Dari sebuah penelitian mengenai pengemudi becak di Kota Makassar, misalnya, diketahui bahwa hubungan kekerabatan yang sudah ada sejak dari “kampung” sebelum bermigrasi ke kota menjadi modal utama untuk dapat masuk ke pangkalan-pangkalan becak tertentu. Pengamatan sekilas pada sektor perhubungan dalam kota (*pete-pete*) juga menunjukkan gejala yang sama. Asal daerah dan sistem kekerabatan adalah kunci-kunci penting untuk *exit-entry* sektor informal (Zainuddin Mari, 2002). Pengamatan terhadap dominannya sektor informal ini membuat pernyataan bahwa orang Cina di Ujung Pandang pada saat kerusuhan tahun 1997 “nyaris menguasai seluruh sendi perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan, mulai dari toko kelontong, grosir atau eceran, sampai pada pengadaan-pengadaan barang di instansi-instansi pemerintah,” (Sukriansyah S. Latif dan Tomi Lebang, 1998) menjadi pernyataan yang menggelikan dan tidak jelas dasarnya —kalau bukan malah menyesatkan. Ekonomi Sulawesi Selatan yang terus-menerus didominasi oleh sektor pertanian —tepatnya sektor pertanian pangan— jelas tidak di dalam kekuasaan orang Cina. Sektor informal yang merupakan sektor eceran yang merajai ekonomi Kota Ujung Pandang di tahun 1997 juga terlalu besar, terlalu cair, dan terlalu terbagi-bagi jumlah pekerja dan *outlet*-nya untuk dapat dikuasai oleh satu kelompok etnis saja. Tampaknya kerusuhan lebih merupakan bagian dari upaya peneguhan kepribumian —apapun maknanya— kota dari masa kininya yang dianggap ‘kehilangan’ kepribumiannya tersebut.

Menuju Metropolitan Yang “Pribumi”?

Setidaknya sejak tahun 1950 telah terjadi perubahan struktur demografi dan politik di Kota Makassar. Proses migrasi dari daerah Sulawesi Selatan ke dalam kota menyebabkan semakin besarnya proporsi penduduk yang berbahasa Bugis, terutama migran baru, dan tentu saja semakin kecilnya proporsi penduduk kota yang berasal dari daerah provinsi lainnya. Proses ini dibarengi dengan adanya dinamika politik lokal yang membawa tokoh-tokoh Sulawesi Selatan kepada jabatan-jabatan politis di Kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan. Posisi walikota dan gubernur hampir selalu dijabat oleh mereka yang lahir di Sulawesi Selatan. Sejak waktu itu pula, citra Kota Makassar bergeser dari kosmopolitan ke “provinsial” dengan penonjolan keetnisan yang kuat. Dominannya sektor informal yang sangat diwarnai unsur patron-klien tradisional membuat “citra” etnis kota ini memiliki juga dimensi sosial (dan mungkin ideologis). “Ideologi” patron-klien tradisional kemudian menjadi “ideologi” yang hegemonik di kota ini. Relasi sosial antarwarga kota, baik di dalam institusi resmi (seperti lembaga pemerintahan ataupun lembaga pendidikan) maupun institusi swasta (perusahaan, misalnya), sangat diwarnai oleh unsur-patron klien tradisional ini. Di awal abad ke-21 ini, ada dua arus kegelisahan yang berlawanan yang mewarnai renungan dan harapan atas nasib kota di masa kini dan di masa depan. Di satu sisi, sejalan dengan perubahan struktural, ada arus untuk meneguhkan citra “etnis” kota ini. Menurut para tokohnya, hal tersebut didasarkan pada klaim historis yang mengasumsikan adanya kontinuitas dari masa lalu ke masa kini. Klaim ini, setidaknya di permukaannya, berjalan berdampingan dengan pencarian “kepribumian” kota. Di puncak kerusuhan besar yang melanda Kota Ujung Pandang di tahun 1997, dapat kita lihat di pelbagai sudut kota tulisan di tembok (graffiti) yang berbunyi “Pribumi” atau “Milik Pribumi Maros” atau, kalau masih dianggap kurang meyakinkan, “Milik Pribumi Asli.” Kerusuhan tahun 1997, dan oleh sebagian kalangan diberikan pembenaran, dilihat sebagai direbutnya kembali kota dari —seharusnya— orang nonpribumi. Kerusuhan 1997 seolah merayakan “kepribumian” Kota Makassar.

Siapakah yang dimaksud dengan “pribumi” di Makassar? Orang kelahiran Kota Makassar yang selalu minoritas? Para migran dari daerah berbahasa Bugis? Orang Cina dan Melayu yang sudah di kota ini sekurangnya sejak abad ke-18? Di sisi lain, ada arus kegelisahan yang

tidak kalah kuatnya untuk menciptakan Kota Makassar yang internasional, metropolitan, dan modern di tengah dunia yang makin kecil ini³. Kekhawatiran atas tidak adanya penerbangan “internasional” di bandar udara Hasanuddin yang sudah terlanjur dianggap “internasional” (lengkap dengan pos pemeriksaan imigrasi dan bea cukai) di tahun 2003 adalah satu bentuk kegelisahan ini⁴. Keinginan untuk menjadi metropolitan dan kosmopolitan mau tidak mau berarti pengakuan atas keberagaman dan ke-“nonpribumi”-an Kota Makassar. Ini berarti bahwa pengakuan terhadap peranan historis orang Cina, Melayu, Jawa, Indo, Timor, dan lainnya.

Yang lahir dari kontradiksi-kontradiksi ini semua adalah peristiwa-peristiwa ironis. Di tahun 1999, nama Makassar “kembali” menjadi nama kota ini. Namun Makassar di tahun 1999 ini bukanlah Makassar di tahun 1950 atau sebelumnya. Sudah terdapat kondisi struktural (demografis, politis, maupun ekonomis) yang menyebabkan kota ini lebih bercorak “Sulawesi Selatan” dan kurang “kosmopolitan” dibandingkan dengan Makassar di masa lalu. Seperti juga pembangunan gerbang “Chinatown” di Jalan Jampea di tahun 2003, tujuh tahun setelah kerusuhan besar yang berusaha untuk menghapuskan jejak-jejak ke-Cina-an. Gerbang, seperti juga nama, tampaknya adalah penanda (*signifier*) akan sesuatu yang sudah hilang.

Referensi

- Abustam, M. Idrus. 1989. *Gerak Penduduk, Pembangunan dan Perubahan Sosial: Kasus Tiga Komunitas Padi Sawah di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Anonim. 1939. *Gids van Makassar en Zuid Celebes*. Makassar: Celebes Drukkerij.
- Anonim. 1954. *Pedoman Kota Besar Makassar*. Makassar: Tri Bakti.
- DPdK. 1984/1985. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan: Mobilitas Sosial di Kota Makassar 1900-1950*. Jakarta.

³ Satu ilustrasi sederhana: harian lokal yang populer, *Fajar*, menyebut lembar khususnya untuk berita kota sebagai “Metro” tentu dari kata “metropolitan”.

⁴ Bulan Maret 2003, SilkAir yang merupakan anak perusahaan Singapore Airlines mengumumkan akan menghentikan pelayanan penerbangan Singapura-Makassar yang adalah satu-satunya penerbangan internasional ke dan dari Makassar. Penghentian ini disambut dengan keresahan yang luar biasa di antara para pejabat daerah.

- Forbes, Dean. 1979. *The Pedlars of Ujung Pandang*. Victoria: Centre for Southeast Asian Studies, Monash University.
- Harvey, Barbara. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/ TII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Harvey, Barbara S. 1985. "Sulawesi Selatan: Boneka dan Patriot," dalam Audrey R. Kahin, *Pergolakan di Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Latif, Sukriansyah S. dan Tomi Lebang. 1998. *Amuk Makassar*. Jakarta: ISAI.
- McTaggart, W. Donald. 1976. "Kebijakan Pembangunan Kota di Indonesia: kasus Ujung Pandang, Sulawesi Selatan," *Masyarakat Indonesia*, 3(1): 71-104.
- Pardosi, Thoman, Togi Siahaan, Theodora Siagian dan Indra Susilo. 1997. *Profil Migran Masuk di Enam Kota Besar: Hasil Survei Urbanisasi 1995*. Jakarta: BPS.
- Poelinggomang, Edward Lambertus. 1983. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan: Makassar 1906-1942*. Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. 1980. *Sensus Penduduk 1961: Penduduk Desa Sulawesi dan Maluku*. Yogyakarta: Kerja sama dengan BPS.
- Sumalyo, Yulianto. 2002. *Pola Perkembangan Kota dan Arsitektur Ujung Pandang*. Makassar: Jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Hasanuddin.
- Titus, M. J. 1999. "Determinants and Trends of Urban Development in Ujung Pandang, Indonesia," *Geographical Studies of Development and Resource Use*, (3).